

PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG

Mulyati Setyaningsih, Adilistiono

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Semarang

Abstract

The Objective of this study to find out accounting treatment of fixed assets based on the Indonesian Government Regulation Number 71 of 2010 on Government Accounting Standards and regional assets management. Writing method is used are the descriptive method and exposition method. Description method is used to describe the general overview, organizational structure and exposition method is used to explain about fixed assets treatment and regional assets management. Treatment of fixed assets in the Semarang already suitable with Government Regulation and decrement increment regional assets management also already suitable Government Regulation Number 27 of 2014 on Assets State/Regional Owned Management.

Keywords: *Accounting Treatment of Fixed Assets, Regional Assets Management, Government Regulation Number 71 of 2010, Government Regulation Number 27 of 2014.*

PENDAHULUAN

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang merupakan salah satu entitas pemerintahan yang didirikan dengan tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pemerintah daerah bentuk harta yang bersifat tahan lama yang dapat menunjang kegiatan operasional dalam akuntansi dikenal dengan istilah aset tetap (*fixed assets*).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penerapan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan menggunakan basis akrual. Pos yang berkaitan dengan aset tetap akan muncul pada laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan operasional. Dalam mengelola aset tetap agar efektif dan efisien pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang diperlukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam tugas akhir ini adalah:

- a. Apakah perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.
- b. Apakah pengelolaan penambahan dan pengurangan aset daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Aset Tetap

Menurut Kawedar dkk (2008:2) aset tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan menurut Hery dan Widyawati (2011:2) aset tetap yakni aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen

serta memiliki masa kegunaan (*useful life*) yang panjang.

Dari penjelasan yang diuraikan diatas, maka pengertian aset tetap merupakan aset yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- b. Peralatan dan Mesin
Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan.
- c. Gedung dan bangunan
Gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.
- e. Aset tetap lainnya
Aset tetap lainnya ini dapat meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.
- f. Konstruksi dalam pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Pengukuran Aset Tetap

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- a. Penilaian Awal Aset Tetap
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- b. Komponen Biaya Aset Tetap
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Perubahan Aset Tetap

Perubahan aset tetap daerah dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Penambahan
Penambahan aset tetap adalah meningkatkan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesarnya aset tetap tersebut. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 penambahan aset tetap dapat diperoleh melalui:
 - 1) Pembelian Aset Tetap
 - 2) Hibah

b. Pengurangan
 Pengurangan aset tetap adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas aset tetap tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pengurangan terjadi karena adanya transaksi sebagai berikut:

- 1) Pemindahtanganan
- 2) Penjualan
- 3) Tukar-menukar
- 4) Penghapusan
- 5) Penyertaan Modal

Penyajian Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Perhitungan yang berkaitan dengan pos aset tetap yang sudah relevan, akurat dan dapat diukur secara andal tersaji pada laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran Menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- b. Neraca
 Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- c. Laporan Operasional
 Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Pengungkapan Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan
 - 2) Pelepasan
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya

c. Informasi penyusutan, meliputi:

- 1) Nilai penyusutan
- 2) Metode penyusutan yang digunakan
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

Basis Pencatatan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual menjadi basis pencatatan akuntansi yang digunakan entitas pemerintahan daerah dalam laporan keuangan yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial dengan menggunakan basis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Jurnal Standar SAP Akrual

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 jurnal standar merupakan media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Tabel 1. Ilustrasi Jurnal Transaksi Anggaran Untuk Belanja Modal Aset Tetap

Jurnal Transaksi Anggaran			
Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	
	Silpa (Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran)		xxx

Sumber: PP No 71 Tahun 2010

Tabel 2. Ilustrasi Jurnal Transaksi Finansial Perolehan Aset Tetap

Jurnal Transaksi Finansial			
Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Peralatan dan Mesin	xxx	
	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

Sumber: PP No 71 Tahun 2010

Ilustrasi untuk perolehan aset peralatan dan mesin melalui hibah/sumbangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Ilustrasi Jurnal Umum Perolehan Hibah Aset Tetap

Jurnal Umum			
Tanggal	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Peralatan dan Mesin	xxx	
	Pendapatan Hibah - LO		xxx

Sumber: PP No 71 Tahun 2010

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis Data Menurut Sifatnya

Jenis data menurut sifatnya terdiri dari:

- a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yang digunakan dalam Tugas Akhir adalah daftar aset tetap, daftar mutasi aset tetap, laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan operasional Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
- b. Data Kualitatif

Data kualitatif yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir yaitu sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Jenis Data Menurut Sumbernya

Data sekunder yang diperoleh meliputi gambaran umum, struktur organisasi, daftar aset tetap, daftar mutasi aset tetap, laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan operasional Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

- a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan staf bidang aset daerah dan bidang akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang untuk

memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir.

- b. Studi Pustaka

Dalam hal ini studi pustaka diperlukan untuk membaca peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku akuntansi sektor publik maupun akuntansi keuangan menengah mengenai aset tetap.

Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

- a. Metode Deskripsi

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan gambaran umum serta struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
- b. Metode Eksposisi

Metode ini digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, yang dimaksud dengan perlakuan akuntansi aset tetap adalah perlakuan akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan pengelolaan aset daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sebagai SKPD peranan DPKAD mengelola belanja gaji pegawai negeri sipil (PNS), belanja rutin SKPD, belanja kegiatan SKPD beserta pengelolaan aset Kota Semarang dan mengelola pendapatan asli daerah Kota Semarang. DPKAD selaku PPKD berperan mengelola pendapatan, perimbangan, dan penerimaan lain-lain belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah, serta DPKAD bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Semarang mempunyai visi dan misi dalam pelaksanaannya yaitu:

Visi:

“Menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah”

Misi:

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan penyusunan perangkat hukum yang mengkait pendapatan
2. Optimalisasi pendapatan asli daerah dari dana perimbangan melalui keterlibatan secara aktif dari fiskus, masyarakat / wajib pajak dan koordinasi
3. Efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan standar analisa belanja.
4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penerapan Standar Akuntansi Publik (SAP) dalam penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.
5. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pengakuan Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi

kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Pengakuan aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sebagai contoh adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
Pengadaan tanah untuk pengganti kebun bibit Dinas Pertanian yang terkena pembangunan jalan tol seluas 2352m² dengan sertifikat SHM Nomor 47 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 237.552.000.
- b. Peralatan dan Mesin
Pengadaan peralatan dan mesin berupa mesin foto copy IR 2520 digital canon yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 30.200.000 yang digunakan untuk kegiatan operasi bidang aset.
- c. Aset Tetap Lainnya
Pengadaan aset tetap lainnya berupa buku peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 972.000 yang digunakan seksie perencanaan.

Pengukuran Aset Tetap

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki aset tetap yang telah diperoleh tahun sebelumnya dan belum mempunyai nilai sehingga penilaian awal dilakukan pada tahun 2013 yang tidak mempengaruhi belanja modal adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
Tanah dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan yaitu Rp 2.555.000.000 yang meliputi tanah kantor perdagangan Rp 1.397.000.000 tanah eks PD BPR BKK

Semarang Rp 540.000.000 dan tanah Yayasan Pengusaha Peduli Sosial Semarang Rp 618.000.000

b. Gedung dan Bangunan

Gudang eks kantor perdagangan dengan luas 776 m² dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan senilai Rp 188.100.000

Penyajian Aset Tetap

a. Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Laporan Realisasi Anggaran Untuk Belanja Modal Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Des 2013

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
BELANJA MODAL		
Belanja Tanah	25.832.492.500	11.836.739.500
Belanja Peralatan dan Mesin	3.356.641.810	2.944.419.600
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Belanja Aset Tetap	7.200.000	3.017.000
Lainnya		
Jumlah Belanja Modal	29.196.334.310	14.784.176.100

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2013

b. Neraca

Tabel 5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Neraca Per 31 Desember 2013

Uraian	Saldo Per 31 Des 2012	Saldo Per 31 Des 2013
ASET TETAP		
Tanah	77.481.867.859	116.688.207.359
Peralatan dan Mesin	13.363.432.969	16.062.677.640
Gedung dan Bangunan	320.422.681	508.522.681
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.030.171	5.030.171
Aset Tetap Lainnya	509.714.375	883.366.375
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan	(7.874.918.601)	(9.444.388.192)
Jumlah Aset Tetap	83.805.549.454	124.703.416.034

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2013

Tabel 6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Laporan Operasional untuk Beban Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013

Uraian	Saldo 31 Des 2013
BEBAN	
Beban Pegawai	64.235.011.359
Beban Persediaan	4.456.365.643
Beban Jasa	46.500.627.914
Beban Pemeliharaan	165.211.000
Beban Perjalanan Dinas	2.227.426.053
Beban Bunga	253.270.899
Beban Hibah	41.621.315.866
Beban Bantuan Sosial	2.731.600.000
Beban Bantuan Keuangan	788.567.000
Beban Penyusutan	3.135.262.604
Beban Penyisihan Piutang	50.416.401.536
Beban Cadangan Kerugian Investasi Non Permanen	0
Beban Penghapusan Aset	0
Beban Hibah Aset	0
Beban Dibayar di Muka	0
Beban Lain-lain	806.709.097
Beban Dana BOS	0
Jumlah Beban	217.337.768.971

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2013

Pengungkapan Aset Tetap

Dasar penilaian aset tetap yang digunakan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menentukan nilai tercatat yakni berdasarkan biaya perolehan, bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai biaya aset tetap tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Basis yang diterapkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah basis akrual sehingga telah memperhitungkan penyusutan, metode yang digunakan dalam penyusutan adalah metode garis lurus. Masa manfaat aset tetap telah terlampir pada Peraturan Walikota Nomor 19A.

Penerapan Pengelolaan Barang Milik Daerah Perubahan Aset Tetap
Tabel 6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang
Daftar Aset Tetap 31 Desember 2013

No Urut	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Saldo Per 1 Januari 2013		Mutasi Perubahan Selama 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013				Saldo Per 31 Desember 2013	
					Bertambah		Berkurang			
			Jml Barang	Jumlah Harga (Rp)	Jml Barang	Jumlah Harga (Rp)	Jml Barang	Jumlah Harga (Rp)	Jml Barang	Jumlah Harga (Rp)
1	1	TANAH	287	77.481.867.859	24	39.206.339.500	-	-	311	116.688.207.359
2		PERALATAN DAN MESIN	2542	13.363.432.969	516	4.732.701.063	747	2.033.456.392	2316	16.062.677.640
	2	Alat -Alat Besar	37	281.018.064	1	30.200.000	15	63.670.657	23	247.547.407
	3	Alat- Alat Angkutan	218	3.962.817.368	34	2.011.010.939	18	33.300.000	234	5.940.528.307
	4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	26	140.583.752	-	-	3	23.230.000	23	117.353.752
	5	Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1857	7.734.457.309	471	2.510.110.124	575	1.697.858.059	1753	8.546.709.374
	7	Alat Studio Dan Alat Komunikasi	76	515.076.585	7	118.580.000	14	16.740.000	69	616.916.585
	8	Alat-Alat Kedokteran	127	163.768.000	-	-	62	54.909.000	65	108.859.000
	9	Alat Laboratorim	192	319.330.715	3	62.800.000	58	47.165.000	131	334.965.715
	10	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	9	246.381.176	-	-	2	96.583.676	7	149.797.500
3		GEDUNG DAN BANGUNAN	171	320.422.681	1	188.100.000	-	-	172	508.522.681
	11	Bangunan Gedung	171	320.422.681	1	188.100.000	-	-	172	508.522.681
	12	Monumen	-	-	-	-	-	-	-	-
4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1	5.030.171	-	-	-	-	1	5.030.171
	13	Jalan dan Jembatan	-	-	-	-	-	-	-	-
	14	Bangunan Air/Irigasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	Instalasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	16	Jaringan	1	5.030.171	-	-	-	-	1	5.030.171
5		ASET TETAP LAINNYA	291	509.714.375	83	373.652.000	-	-	338	883.366.375
	17	Buku Dan Perpustakaan	190	50.075.375	16	3.017.000	-	-	206	53.092.375
	18	Barang Bercorak Kebudayaan	101	459.639.000	67	370.635.000	-	-	168	830.274.000
	19	Hewan Dan Ternak Serta Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH	3292	91.680.468.055	624	44.500.792.563	747	2.033.456.392	3133	134.147.804.226
	16	Jaringan	1	5.030.171	-	-	-	-	1	5.030.171
5		ASET TETAP LAINNYA	291	509.714.375	83	373.652.000	-	-	338	883.366.375
	17	Buku Dan Perpustakaan	190	50.075.375	16	3.017.000	-	-	206	53.092.375
	18	Barang Bercorak Kebudayaan	101	459.639.000	67	370.635.000	-	-	168	830.274.000
	19	Hewan Dan Ternak Serta Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH	3292	91.680.468.055	624	44.500.792.563	747	2.033.456.392	3133	134.147.804.226

Mengidentifikasi Data Mutasi Aset Tetap Saldo Awal Aset Tetap Diidentifikasi

Saldo awal aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Rekapitulasi Daftar Aset Tetap 1 Januari 2013

Gol	Nama Bidang Barang	Jml Brg	Jml Harga (Rp)
1	TANAH	287	77.481.867.859
2	PERALATAN DAN MESIN		
	a. Alat-Alat Besar	37	281.018.064
	b. Alat-Alat Angkutan	218	3.962.817.368
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	26	140.583.752
	d. Alat Pertanian	0	0
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1857	7.734.457.309
	f. Alat Studio dan Alat Komunikasi	76	515.076.585
	g. Alat-Alat Kedokteran	127	163.768.000
	h. Alat Laboratorium	192	319.330.715
	i. Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	9	246.381.176
3	GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung	171	320.422.681
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN Jaringan	1	5.030.171
5	ASET TETAP LAINNYA		
	a. Buku Perpustakaan	190	50.075.375
	b. Barang Bercorak Kebudayaan	101	459.639.000
	Jumlah	3292	91.680.468.055

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, 2013

Bukti Penambahan Aset Tetap Diidentifikasi

Daftar penambahan aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sebagai bukti penambahan selama tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Rekapitulasi Daftar Penambahan Barang Tahun 2013

Gol	Nama Bidang Barang	Jml Brg	Jml Harga (Rp)
1	TANAH	24	39.206.339.500
2	PERALATAN DAN MESIN		
	a. Alat-Alat Besar	1	30.200.000
	b. Alat-Alat Angkutan	34	2.011.010.939
	c. Alat Kantor dan Rumah Tangga	471	2.510.110.124
	d. Alat Studio dan Alat Komunikasi	7	118.580.000
	e. Alat Laboratorium	3	62.800.000
3	GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung	1	188.100.000
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0	0
5	ASET TETAP LAINNYA		
	Buku Perpustakaan	16	3.017.000
	Barang Bercorak Kebudayaan	41	370.635.000
	Jumlah	624	44.500.792.563

Sumber: data sekunder telah diolah kembali, 2015

Bukti Pengurangan Aset tetap Diidentifikasi

Pengurangan aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang terjadi karena dipengaruhi adanya penghapusan. Bukti pengurangan aset tetap selama tahun 2013 diidentifikasi dapat dilihat pada tabel 9. sebagai berikut:

Tabel 9. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Rekapitulasi Daftar Pengurangan Barang Tahun 2013

Gol	Nama Bidang Barang	Jml Brg	Jml Harga (Rp)
1	TANAH	0	0
2	PERALATAN DAN MESIN		
	a. Alat-Alat Besar	15	63.670.657
	b. Alat-Alat Angkutan	18	33.300.000
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	3	23.230.000
	d. Alat Kantor dan Rumah Tangga	575	1.697.858.059
	e. Alat Studio dan Alat Komunikasi	14	16.740.000
	f. Alat-Alat Kedokteran	62	54.909.000
	g. Alat Laboratorium	58	47.165.000
	h. Alat-Alat Peralengkapan	2	96.583.676
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0
4	JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN	0	0
5	ASE TETAP LAINNYA	0	0
	Jumlah	747	2.033.456.392

Sumber: data sekunder telah diolah kembali, 2015

Pencatatan atas Mutasi Aset Tetap Diidentifikasi

1) Jurnal Pengeluaran Kas

Sebagai contoh jurnal transaksi anggaran yang akan mempengaruhi belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran dan jurnal transaksi finansial yang mempengaruhi aset tetap dalam neraca dapat dilihat pada tabel 4.8

2) Jurnal Umum

Contoh Transaksi lainnya dicatat dalam jurnal umum dapat dilihat pada tabel 4.10

3) Buku Besar

Transaksi yang telah dicatat ke dalam jurnal, selanjutnya akan diposting ke dalam buku besar. Contoh Buku besar aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dapat dilihat pada tabel 10

Tabel 10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Jurnal Transaksi Anggaran Untuk Belanja Modal 31 Desember 2013

Tgl	Nama Akun dan Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des	Belanja modal tanah	11.836.739.500	-
2013	Silpa	-	11.836.739.500
	(Mencatat belanja modal tanah)		

Tabel 11. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Jurnal Transaksi Finansial Perolehan Aset Tetap 31 Desember 2013

Tgl	Nama Akun dan Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des	Tanah	11.836.739.500	-
2013	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	11.836.739.500
	(Mencatat belanja Modal tanah)		

Tabel 12. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Jurnal Umum 31 Desember 2013

Tgl	Nama Akun dan Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31 Des	Alat-alat angkutan	696.986.714	-
2013	Pendapatan LO	-	696.986.714

Tabel 13. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Buku Besar 31 Desember 2013

Belanja Modal Tanah				
Tgl	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
2013				
31 Des	Belanja Modal Tanah	11.836.739.500	-	11.836.739.500

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diterapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dalam penambahan dan pengurangan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hery dan Widayawati L. 2011. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta: PT Bumi Aksara

- Kawedar, Warsito et al. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Undip Semarang
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013 Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia